

IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP), SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN PERAN *INTERNAL AUDIT* INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

¹ I Made Ary Dwiyana, ² I Gede Agus Pertama Yudiantara, ³ I Putu Julianto

Jurusan Ekonomidan Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Bali, Indonesia

e-mail: ¹ I arydwiyana70@gmail.com

² I agus_yuda126@yahoo.co.id, ³ I putujulianto@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peran *Internal Audit* Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng terhadap Kualitas Laporan Keuangan secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan data primer. Penelitian ini termasuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif serta menggunakan jenis penelitian kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Dinas di Lingkungan Kabupaten Buleleng dengan jumlah sample 46 responden, sample dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner kemudian data diolah dengan *statistical package for social sciences* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan secara parsial dan simultan bahwa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran *Internal Audit* Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Hal ini dikarenakan ketiga variable tersebut memiliki nilai t hitung lebih besar dari t table begitu pula dan signifikan lebih kecil dari 0,05 begitu pula dengan simultan yang menunjukkan bahwa secara bersama- sama dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05.

Kata kunci :Audit, Akuntansi, Implementasi, Kualitas, Pemerintah

Abstract

This research aimed at examining the Implementation of Government Accounting Standards, Government Internal Control System, and the Role of Internal Audit of the Regional Inspectorate of Buleleng Regency to the Quality of Financial Statements partially or simultaneously. This study uses primary data. This research includes research with a quantitative approach and uses a type of causal research. The population in this study were all employees at the Office in the Buleleng Regency with a sample of 46 respondents, The sample was selected using a purposive sampling method. The data collection technique in this study uses a questionnaire then the data is processed by the statistical package for social sciences (SPSS). The results of the study show partially and simultaneously that the Implementation of Government Accounting Standards, Government Internal Control System, and the Internal Audit Role of the Buleleng Regency Inspectorate has a positive effect on the Quality of the Buleleng Regency Government Financial Report. This is because the three variables have t count values greater than t table so too and significantly smaller than 0.05 as well as simultaneous which indicates that together with a significant value smaller than 0.05.

Keywords: Audit, Accounting, Implementation, Quality, Government

PENDAHULUAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah (biasa disingkat SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD, pada akhirnya akan meminta kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ (surat pertanggungjawaban), tetapi berupa laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan sehingga laporan keuangan pemerintah harus berkualitas.

Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal ini mendapat opini keempat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 secara berturut – turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Namun, walau Pemerintah Kabupaten Buleleng mendapat opini WTP namun masih ada beberapa hal yang menjadi catatan dari BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Seperti halnya salah satunya pada rekapitulasi temuan pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti (TPB) di wilayah provinsi bali tahun 2017 dimana terdapat temuan pemeriksaan (TP) Kabupaten Buleleng dan belum sama sekali mendapat perhatian tindak lanjut. Rekapitulasi temuan pemeriksaan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1

Rekapitulasi Temuan Pemeriksaan Yang Belum Ditindaklanjuti (TPB) Di Wilayah Propinsi Bali Tahun 2017 Posisi Sampai dengan Tahun 2017

No	Pemda	Temuan Pemeriksaan (TP)		Tindak Lanjut (TL)		Temuan yang Belum Ditindaklanjuti	
		Kej	Nilai (Rp)	Kej	Nilai (Rp)	Kej	Nilai (Rp)
1	Provinsi Bali	127	1,462,415,213.56	33	272,470,193.56	94	1,189,945,020.00
2	Kab. Badung	38	11,804,583,702.80	7	146,450,001.44	31	11,658,133,701.36
3	Kab. Bangli	65	287,997,830.30	20	800,000.00	45	287,197,830.30
4	Kab. Buleleng	26	1,851,803,287.76	0	0.00	26	1,851,803,287.76
5	Kab. Gianyar	72	275,488,489.65	36	97,151,900.00	36	178,336,589.65
6	Kab. Jembrana	12	1,224,611,696.00	1	66,724,510.00	11	1,157,887,186.00
7	Kab. Karangasem	66	867,346,118.97	9	7,118,000.00	57	860,228,118.97
8	Kab. Klungkung	40	340,478,853.30	2	0.00	38	340,478,853.30
9	Kab. Tabanan	27	124,142,731.53	14	61,939,157.00	13	62,203,574.53
10	Kota Denpasar	20	1,107,053,132.50	5	949,696,977.00	15	157,356,155.50
Jumlah		493	Rp 19,345,921,056.37	127	Rp 1,602,350,739.00	366	Rp 17,743,570,317.37

(Sumber : Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali)

Berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Bali, maka Kabupaten berada di urutan kedua terhadap temuan pemeriksaan yang dilakukan BPKP sehingga dengan adanya

temuan tersebut maka Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng belum benar – benar berkualitas dimana dilihat dari masih adanya temuan – temuan dari pemeriksaan yang dilakukan

oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam pelaporan keuangan sehingga adanya ketidak sesuaian dengan standar yang sudah ada.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel menurut penelitian – penelitian yang dilakukan terdahulu seperti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Peran *Audit* Internal Inspektorat Daerah.

Iman Mulyana (2010) menegaskan bahwa kualitas Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan” sehingga kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dan dinilai dari karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam setiap laporan akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang merupakan prasyarat normatif antara yaitu: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah: "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan." Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisah-pisah. Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian

Selain Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh peran Audit Internal. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2012 pada Point Penajaman Pengawasan angka 4 telah tercantum bagaimana perumusan peran dari Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu: (1) Untuk menguji dan menganalisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Buleleng. (2) Untuk menguji dan menganalisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Buleleng. (3) Untuk menguji dan menganalisis Peran *Internal Audit* Inspektorat Daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten Buleleng. (4) Untuk menguji dan menganalisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran *Internal Audit* Inspektorat Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Buleleng.

Hipotesisi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H¹ : Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

H² : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

H³ : Peran *Internal Audit* Inspektorat Daerah berpengaruh Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

H⁴ : Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran *Internal Audit* Inspektorat Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Buleleng. Penelitian ini termasuk dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan berbentuk angka-angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Subjek penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan yang pernah berpartisipasi dalam pembuatan LKPD pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Objek penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan sampel pada Dinas di Lingkungan Kabupaten Buleleng. metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan kuisioner yang kemudian hasil jawaban dari kuisioner tersebut akan dihitung menggunakan skala *likert*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Dinas Lingkungan Kabupaten Buleleng dimana merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pada penelitian ini, teknik sample yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*, dimana Menurut Agung. G. (2014:77) *purposive sampling* adalah teknik sampling ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata, random, wilayah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Sehingga, sample pada penelitian ini adalah sebanyak 46 responden dimana dengan kriteria pegawai adalah kepala sub bagian keuangan, pegawai bagian keuangan/akuntansi, pernah bertugas membuat laporan keuangan dan bekerja di Dinas pada SKPD Kabupaten Buleleng. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik analisa

statistik melalui pemanfaatan *statistikal Package for Social Science (SPSS) versi 23* antara lain adalah Analisa Regresi Linear Berganda, Pengujian Hipotesis dan Koefisien Determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Setelah dilakukan pengujian, dapat ditarik 4 deskripsi umum hasil penelitian, yaitu sebagai berikut : (1) Variabel implementasi SAP (X_1) mempunyai skor minimum 15, skor maksimum 70, skor rata-rata 43,13 dengan standar deviasi 10,041. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai implementasi SAP terhadap nilai rata-rata sebesar 10,041. (2) Variabel sistem pengendalian internal pemerintah (X_2) mempunyai skor minimum 31, skor maksimum 40, skor rata-rata 33,43 dengan standar deviasi 2,187. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai sistem pengendalian internal pemerintah terhadap nilai rata-rata sebesar 2,187. (3) Variabel peran internal audit (X_3) mempunyai skor minimum 19, skor maksimum 25, skor rata-rata 21,02 dengan standar deviasi 1,626. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai peran internal audit terhadap nilai rata-rata sebesar 1,626. (4) Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) mempunyai skor minimum 30, skor maksimum 40, skor rata-rata 33,87 dengan standar deviasi 2,655. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap nilai rata-rata sebesar 2,655. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics						
	<i>N</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>	
Implementasi SAP	46	15	70	43,13	10,041	
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	46	31	40	33,43	2,187	
Peran Internal Audit	46	19	25	21,02	1,626	
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	46	30	40	33,87	2,655	
<i>Valid N (listwise)</i>	46					

Nilai R_{tabel} pada penelitian ini dapat dilihat dengan jumlah sampel 46 diperoleh $df = n - 2 = 46 - 2 = 44$, sehingga nilai R_{tabel} $df = 44$

dengan signifikansi 0,05 adalah 0,2907. Jika $R_{hitung} > R_{tabel}$ dan nilai r positif, maka butir atau pernyataan tersebut dinyatakan

valid. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan masing-masing indikator dari variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peran Internal Audit memiliki nilai R_{hitung} lebih besar dari R_{tabel} dan nilai r rata-rata keseluruhan memiliki nilai positif sehingga dapat disimpulkan seluruh item pernyataan dinyatakan valid.

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel implementasi SAP mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,940. Variabel sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,800. Variabel peran internal audit mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,782. Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,885. Semua variabel mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 sehingga dapat dinyatakan bahwa instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah reliabel. Model regresi yang baik adalah yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Berdasarkan uji yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa nilai *Kolmogorov Smirnov* sebesar 0,155 dengan nilai signifikansi sebesar 0,107 > 0,05 yang berarti nilai residual berdistribusi secara normal.

Uji multikolonieritas, pendeteksian multikolonieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode VIF. Apabila

terhadap variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi. Hasil dari uji multikolonieritas pada penelitian ini dapat diketahui sebagai berikut. Hasil uji multikolonieritas dengan metode VIF memperoleh nilai VIF < 10 dengan nilai VIF Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (X1) sebesar 1,039, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2) sebesar 1,985, dan Peran Internal Audit (X3) sebesar 1,997, yang berarti bahwa semua variabel bebas tidak terjadi multikolonieritas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Berdasarkan uji yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa variabel implementasi SAP mempunyai nilai sig. sebesar 0,556, variabel sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai nilai sig. 0,688, dan variabel peran internal audit mempunyai nilai sig. sebesar 0,127. Semua variabel mempunyai probabilitas signifikansi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Hasil perhitungan dari analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,429	5,453		1,362	0,018
Implementasi SAP	0,020	0,032	0,074	2,612	0,025
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,327	0,204	0,269	2,603	0,012
Peran Internal Audit	0,698	0,275	0,427	2,539	0,015

a. *Dependent Variable*: Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda pada tabel 4.9, maka didapatkan hasil persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 7,429 + 0,020 X_1 + 0,327 X_2 + 0,698 X_3 + \varepsilon$$

Berdasarkan model regresi yang terbentuk, dapat diinterpretasikan hasil sebagai

berikut: (1) Konstanta 7,429 menunjukkan bahwa apabila variabel implementasi SAP, sistem pengendalian intern pemerintah, dan peran internal audit bernilai konstan, maka rata-rata nilai variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar 7,429. (2) Koefisien regresi implementasi SAP sebesar 0,020 berarti bahwa apabila terdapat penambahan implementasi SAP sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,020 satuan. (3) Koefisien regresi sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 0,327 berarti bahwa apabila terdapat penambahan sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,327 satuan. (4) Koefisien regresi peran internal audit sebesar 0,698 berarti bahwa apabila terdapat penambahan peran internal audit sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,698 satuan.

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak pada penelitian ini yaitu dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dan nilai signifikansi. Berdasarkan hasil uji statistik t dapat diinterpretasikan hasil bahwa nilai t_{hitung} pada variable Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 2,612 dengan nilai signifikansi sebesar 0,025, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,603 dengan nilai signifikansi sebesar 0,012, dan Peran Internal Audit memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,539 dengan nilai signifikansi sebesar 0,015 dimana dengan jumlah sampel 46, diperoleh $df=N-k-1 = 46-3-1=42$, sehingga t_{tabel} dengan $df=42$ adalah 2,018082 sehingga variabel Implementasi Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peran Internal memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} dan dengan signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa seluruh variabel berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan dimana

pada Uji F atau uji serentak dapat disebut uji statistik secara simultan, yaitu uji statistik bagi koefisien regresi yang serentak atau bersama-sama mempengaruhi Y dengan hasil uji yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada uji statistik F sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y. Hal ini berarti pada Uji F atau uji serentak dapat disebut uji statistik secara simultan pada Hipotesis keempat (H_4) yaitu implementasi SAP, sistem pengendalian intern pemerintah, dan peran internal audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Setelah dilakukan uji statistik dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,661 yang menunjukkan bahwa variasi variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Internal Audit hanya mampu menjelaskan 66,1% variasi variabel kualitas laporan keuangan pemerintah. Sisanya sebesar 33,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi tingkat kualitas laporan keuangan pemerintah.

PEMBAHASAN

Pengaruh Implementasi SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat bahwa variabel implementasi SAP (X_1) mempunyai skor minimum 15, skor maksimum 70, skor rata-rata 43,13 dengan standar deviasi 10,041. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai implementasi SAP terhadap nilai rata-rata sebesar 10,041. Sementara itu, variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) mempunyai skor minimum 30, skor maksimum 40, skor rata-rata 33,87 dengan standar deviasi 2,655. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap nilai rata-rata sebesar 2,655.

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi implementasi SAP sebesar 0,020 berarti bahwa apabila terdapat penambahan implementasi SAP sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,020 satuan.

Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel implementasi SAP (X_1) mempunyai t_{hitung} sebesar 2,612 > t_{tabel} sebesar 2,018082 dengan nilai signifikansi sebesar 0,025 < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_1 mempunyai kontribusi terhadap Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah memiliki kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X_2) mempunyai skor minimum 31, skor maksimum 40, skor rata-rata 33,43 dengan standar deviasi 2,187. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai sistem pengendalian internal pemerintah terhadap nilai rata-rata sebesar 2,187. Sementara itu, variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) mempunyai skor minimum 30, skor maksimum 40, skor rata-rata 33,87 dengan standar deviasi 2,655. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap nilai rata-rata sebesar 2,655.

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 0,327 berarti bahwa apabila terdapat penambahan sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,327 satuan.

Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah (X_2) mempunyai t_{hitung} sebesar 2,603 > t_{tabel} sebesar 2,018082 dengan nilai signifikansi sebesar 0,012 < 0,05, maka

dapat dinyatakan bahwa variabel X_2 mempunyai kontribusi terhadap Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat bahwa variabel peran internal audit (X_3) mempunyai skor minimum 19, skor maksimum 25, skor rata-rata 21,02 dengan standar deviasi 1,626. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai peran internal audit terhadap nilai rata-rata sebesar 1,626. Sementara itu, variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) mempunyai skor minimum 30, skor maksimum 40, skor rata-rata 33,87 dengan standar deviasi 2,655. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap nilai rata-rata sebesar 2,655.

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi peran internal audit sebesar 0,698 berarti bahwa apabila terdapat penambahan peran internal audit sebesar 1 satuan, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,698 satuan.

Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa variabel peran internal audit (X_3) mempunyai t_{hitung} sebesar 2,539 > t_{tabel} sebesar 2,018082 dengan nilai signifikansi sebesar 0,015 < 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa variabel X_3 mempunyai kontribusi terhadap Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa Peran Internal Audit pada Inspektorat Daerah dapat memberikan pengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Internal Audit memiliki integritas dan obyektivitas yang bagus serta kompetensi yang sesuai dalam menjaga kualitas dari laporan keuangan dimana Internal Audit Juga memiliki kerahasiaan

dalam menjaga kualitas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga laporan keuangan SKPD menjadi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pengaruh Implementasi SAP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat bahwa variabel implementasi SAP (X_1) mempunyai skor minimum 15, skor maksimum 70, skor rata-rata 43,13 dengan standar deviasi 10,041. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai implementasi SAP terhadap nilai rata-rata sebesar 10,041. Variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X_2) mempunyai skor minimum 31, skor maksimum 40, skor rata-rata 33,43 dengan standar deviasi 2,187. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai sistem pengendalian internal pemerintah terhadap nilai rata-rata sebesar 2,187.

Variabel peran internal audit (X_3) mempunyai skor minimum 19, skor maksimum 25, skor rata-rata 21,02 dengan standar deviasi 1,626. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai peran internal audit terhadap nilai rata-rata sebesar 1,626. Sementara itu, variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) mempunyai skor minimum 30, skor maksimum 40, skor rata-rata 33,87 dengan standar deviasi 2,655. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap nilai rata-rata sebesar 2,655.

Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y. Hal ini berarti implementasi SAP, sistem pengendalian intern pemerintah, dan peran internal audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

(1) Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan secara parsial, variabel X_1

sampai dengan X_3 menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh dan signifikan terhadap Y dimana dikatakan berpengaruh karena ketiga variabel tersebut memiliki t hitung lebih besar dari t tabel dan signifikan kurang dari 0,05 dan begitu pula secara simultan, berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa secara serentak nilai lebih kecil daripada 0,05 sehingga secara bersama-sama terdapat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat (2) Berdasarkan hasil Uji Statistik t yang telah dilakukan sebelumnya, maka variabel yang paling berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah adalah Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah karena dari uji tersebut diperoleh nilai signifikansi dari variabel Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah yang paling tinggi dibandingkan variabel yang lain.

(3) Berdasarkan hasil penelitian diatas, implikasi dari ketiga variabel tersebut terhadap Kualitas Laporan Keuangan di SKPD Buleleng memiliki pengaruh yang positif dimana dengan ditingkatkannya ketiga variabel tersebut maka kualitas laporan keuangan di SKPD Buleleng akan lebih baik.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, dapat disarankan agar pemerintah daerah lebih mengoptimalkan dalam mengimplementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peran internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan baik secara parsial maupun simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap tingkat Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, G. 2014. Metodologi Penelitian Pendidikan. Yogyakarta: Aditya Media Publishing

- Bungin, B. 2011. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah"
- BPKP. 2018. Laporan Hasil Pengawasan di Wilayah Provinsi Bali 2017. Terdapat pada halaman <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/files/File%202018/Laporan%20Hasil%20Pengawasan%20Prov%20Bali%202017.pdf>
- Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Cetakan IV. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Indriantoro, N., dan Supomo, B. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mulyana, Iman. 2010. ManajemendanKehidupanManusia. Yogyakarta :Kanisus.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta CV.
- "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawas di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2012
- "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah